

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak koordinator wilayah DJP Jawa Tengah 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 64, Pati.

Secara umum, Dinas Pajak bertugas mengelola perpajakan daerah yang masuk di wilayah ia bertugas. Adapun jenis-jenis pajak yang dikelola daerah, misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame atau iklan yang ada di berbagai jalan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak BPHTB, hingga pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

Untuk mencapai tugas dan kewenangan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati mempunyai 91 pegawai yang berada di Pati 87 pegawai dan yang bertugas di KP2KP rembang 4 pegawai yang terdiri dari :

- a. Golongan IV, 5 pegawai
- b. Golongan III, 67 pegawai
- c. Golongan II, 19 pegawai
- d. Golongan I, 0 pegawai

Para pegawai tersebut memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus ditaati. Karena pegawai tersebut termasuk dalam wajib pajak maka salah satu tanggung jawab dan kewajibannya adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati digaji menurut golongan masing-masing pegawai, untuk itu pegawai sebagai wajib pajak dikenakan potongan pajak, berikut uraiannya :

- a. Golongan IV dikenakan potongan sebesar 15 %
- b. Golongan III dikenakan potongan sebesar 5%
- c. Golongan II dan I tidak dikenakan potongan

Disamping penerimaan gaji tersebut diatas para pegawai ada yang mendapatkan honor kegiatan, untuk honor kegiatan yang mempunyai surat perjanjian kerja yang termasuk PPNNP tersebut anggarannya dari belanja APBN pegawai dikenakan PPh pasal 21 final yang besarnya sama dengan uraian tersebut diatas.

Kontribusi pajak sangatlah penting terhadap anggaran penerimaan negara. Target penerimaan Negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70 % dari total pendapatan Negara. Dengan adanya undang-undang pajak penghasilan, Direktorat Jendral Pajak sangat aktif melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak seperti program pemberian nomor pokok wajib pajak melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas wajib pajak. Pemahaman tentang prosedur perhitungan pajak penghasilan, prosedur pajak terutang, dan prosedur pelaporan serta pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat penting karena akan mempermudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi pula peningkatan pendapatan Negara di sektor pajak.

Kurang maksimalnya penelitian mengenai pemahaman prosedur perhitungan pajak penghasilan, prosedur penyetoran pajak terutang, dan prosedur pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi alasan mengapa penulis membuat Tugas Akhir ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memutuskan untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PATI”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan ruang lingkup penulisan, adalah :

1. Prosedur perhitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.
2. Kelebihan dan kelemahan prosedur perhitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Mengetahui prosedur perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.
2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.

1.4 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis yaitu:
 - a. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Diploma III Perpajakan di Universitas Diponegoro.

- b. Media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan pemahaman mekanisme perhitungan pajak penghasilan, mekanisme penyetoran pajak terutang dan mekanisme pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 - c. Media dalam menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja dalam suatu perusahaan.
 - d. Sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan berkaitan dengan ilmu perpajakan.
2. Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati yaitu:
 - a. Dapat dijadikan bahan acuan dalam membuat kebijakan terkait pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 3. Bagi Pihak-Pihak Lain yaitu:
 - a. Sebagai referensi penulisan Tugas Akhir yang berkaitan dengan topik bahasan pada Tugas Akhir ini.

1.5 Cara Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi serta data yang cukup dan terpercaya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data. Dengan data-data yang akurat dan terpercaya dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan beberapa jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati, cara perolehan data primer ini adalah dengan :

- a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan staf bidang pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati yang menguasai materi bahasan Tugas Akhir ini.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.

Dari kegiatan wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis telah didapat data primer yakni, cara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar yang sudah dibukukan serta dipublikasikan. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan:

- a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur yang berhubungan dengan materi laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyampaian tentang isi dari Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan Tugas Akhir. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Berisi penjelasan mengenai sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati, Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati Tengah serta Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan tentang Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan, Prosedur Penyetoran Pajak Terutang dan Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan tentang teori yang dibahas pada bab III, serta saran dari pembahasan ini kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.